



PILKADA SERENTAK 2024: ANALISIS POLARISASI, KOMPETISI, DAN FENOMENA KEJUTAN DI PROVINSI BANTEN

Yusa Djuyandi¹, Luis Fiska Rahayu², Asnawi³

¹Universitas Padjadjaran

^{2,3}Universitas Bina Bangsa

Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id, luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id, asnawi@binabangsa.ac.id

Abstrak

Pilkada serentak 2024 menunjukkan dinamika politik yang menarik, termasuk penurunan tingkat polarisasi dan kompetisi antar kandidat, serta kejutan hasil di beberapa daerah. Artikel ini menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan partisipasi pemilih, dominasi politik kartel, dan perbedaan hasil survei prapemilu, exit poll, serta quick count. Studi ini juga menyoroti peran endorsement tokoh nasional, potensi kecurangan, dan pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Atut sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Kasus ini terkait dengan pengurusan sengketa Pilkada di Kabupaten Lebak dan melibatkan Tubagus Chaeri Wardana, saudara kandung Atut, yang sebelumnya telah ditahan oleh KPK. Penahanan Atut memunculkan pertanyaan: apakah ini akan menjadi akhir dari dinasti politik Atut di Banten? Penahanan ini diyakini melemahkan dinasti politik berbasis rente korupsi yang telah mengakar di wilayah tersebut. Nurmansyah mengungkapkan bahwa politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara (Nurmansyah: 2015).

Kata kunci: *Pilkada serentak, polarisasi, quick count, exit poll, politik kartel, Mahkamah Konstitusi*

Abstract

The 2024 simultaneous regional elections show interesting political dynamics, including a decrease in the level of polarization and competition between candidates, as well as surprise results in several regions. This article analyzes the factors that cause the decline in voter participation, the dominance of cartel politics, and the difference in the results of pre-election surveys, exit polls, and quick counts. This study also highlights the role of endorsement of national figures, the potential for fraud, and the influence of the Constitutional Court (MK) decision regarding the threshold for the nomination of regional heads. The Corruption Eradication Commission (KPK) has named Atut as a suspect in the bribery case against the Chief Justice of the Constitutional Court, Akil Mochtar. This case is related to the management of the Regional Election dispute in Lebak Regency and involves Tubagus Chaeri Wardana, Atut's sibling, who had previously been detained by the KPK. Atut's detention raises the question: will this be the end of Atut's political dynasty in Banten? The detention is believed to weaken the rent-based political dynasties of corruption that have taken root in the region. Nurmansyah revealed that dynastic politics is the process of directing the regeneration of power for the interests of certain groups in order to gain or maintain power in a country (Nurmansyah: 2015).

Keywords: *Simultaneous elections, polarization, quick count, exit poll, cartel politics, Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Beberapa tren utama terlihat, seperti penurunan tingkat

polarisasi dan jumlah kandidat akibat dominasi kartel politik. Di beberapa daerah, hanya terdapat dua kandidat atau bahkan melawan kotak kosong. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi. Selain itu, hasil mengejutkan terjadi di beberapa daerah, seperti kekalahan Airin di Banten dan kemenangan Yulius di Sulawesi Utara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi hasil pilkada, mulai dari variabel survei hingga peran tokoh politik nasional.

Pengaruh dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten melemah dalam Pilkada Serentak 2024. Sejumlah anggota keluarganya mengalami kekalahan berdasarkan hasil penghitungan cepat dari beberapa lembaga survei. Ratu Atut merupakan gubernur perempuan pertama di Indonesia, terpilih dalam Pilkada Banten 2006 dan 2011, setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur serta pelaksana tugas gubernur pada periode 2002-2007. Selama kepemimpinannya, ia dikenal sering menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan publik di Banten.

Pada Pilkada 2024, empat kerabat Atut mencalonkan diri, yaitu Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten, Ratu Ria Maryana di Pilwalkot Serang, Andika Hazrumy di Pilbup Serang, dan Pilar Saga Ichsan di Pilwalkot Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil quick count Charta Politika Indonesia, Airin kalah dengan perolehan 42,28 persen suara, sementara lawannya, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, unggul dengan 57,52 persen suara. Menurut Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, melemahnya dinasti Atut disebabkan oleh dominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), yang memiliki mesin politik kuat dan strategi kampanye efektif. KIM Plus juga menerapkan pendekatan politik modern dengan memanfaatkan media sosial serta acara rakyat, sehingga berhasil menarik perhatian pemilih.

Pengamat politik Adib Miftahul dari Universitas Islam Syekh Yusuf menilai bahwa kejatuhan dinasti Atut dipengaruhi oleh kejenuhan masyarakat terhadap dominasi politik keluarga tersebut, terutama akibat kasus korupsi yang menjerat mereka. Selain itu, faktor dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap kandidat lawan juga berperan besar, mengingat Prabowo memiliki basis massa yang kuat di Banten sejak Pilpres 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dinasti Atut tidak mampu menandingi pengaruh tokoh nasional seperti Prabowo.

Jurnal ini menggunakan sistematika penulisan (Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan). Tumbangnya dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Pilkada 2024 menandai perubahan peta kekuasaan di Banten. Selama lebih dari dua dekade, keluarga Atut

mendominasi berbagai jabatan strategis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, hasil Pilkada kali ini menunjukkan berkurangnya pengaruh politik mereka.

Kekalahan Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten, Andika Hazrumy di Pilbup Serang, serta Ratu Ria Maryana di Pilwalkot Serang menegaskan bahwa dominasi politik keluarga Atut mulai memudar. Satu-satunya kemenangan yang tersisa adalah keberhasilan Lalu Pilar Saga Ichsan di Tangsel, yang menunjukkan bahwa meski pengaruh dinasti ini melemah, sisa-sisa kekuatan politiknya masih ada.

Fenomena ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kejenuhan publik terhadap politik dinasti, perubahan tren pemilih, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya kepemimpinan yang lebih bersih dan kredibel. Selain itu, kompetisi dari tokoh-tokoh baru yang menawarkan alternatif kepemimpinan juga semakin kuat.

Apakah ini menandakan akhir dari politik dinasti di Banten, ataukah hanya fase sementara sebelum mereka bangkit kembali di masa depan?. Kunjungan Airin Rachmi Diany ke markas PDI Perjuangan (PDIP) menjelang Pilkada Banten 2024 menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menunjukkan sikap tegas dengan menunjuk-nunjuk Airin dan memintanya mengenakan baju merah, warna khas PDIP. Tindakan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks, terutama mengingat latar belakang Airin sebagai bagian dari dinasti politik Ratu Atut Chosiyah yang sebelumnya dominan di Banten.

Langkah Airin mendekati PDIP dapat dilihat sebagai upaya strategis untuk mendapatkan dukungan partai besar dalam kontestasi politik di Banten. Namun, respons Megawati menunjukkan bahwa PDIP memiliki pertimbangan khusus dalam menerima figur politik dari luar partai. Kejadian ini menegaskan bahwa meskipun dinasti politik memiliki pengaruh signifikan, adaptasi dan pendekatan terhadap partai politik lain memerlukan strategi yang tepat dan penerimaan dari pihak yang dituju.

Peristiwa ini juga menyoroti dinamika internal partai politik di Indonesia, di mana loyalitas, identitas partai, dan strategi koalisi memainkan peran penting dalam menentukan arah dukungan dan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji laporan survei, data exit poll, dan hasil quick count dari berbagai lembaga survei. Selain itu, wawancara online dengan tokoh politik dan analisis dokumen hukum terkait keputusan MK juga dilakukan untuk

memperkaya temuan dalam penulisan artikel” Pilkada Serentak 2024: Analisis Polarisasi, Kompetisi, dan Fenomena Kejutan di Provinsi Banten“.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penurunan Polarisasi dan Kompetisi.

Tingkat polarisasi politik menurun tajam pada Pilkada 2024 dibandingkan periode sebelumnya, bahkan pilkada 2024 menurut banyak peneliti adalah merupakan pilkada yang adem-ayem. Fenomena ini disebabkan oleh Penurunan Polarisasi dan Kompetisi Tingkat polarisasi politik menurun tajam pada Pilkada 2024 dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena ini disebabkan oleh dominasi kartel politik yang mengurangi jumlah kandidat di banyak wilayah. Di beberapa daerah, pemilihan kepala daerah hanya diikuti dua kandidat, bahkan terdapat kasus melawan kotak kosong. Dampak koalisi tingkat nasional juga menyebabkan partai enggan mengusung kandidat baru.. Di beberapa daerah, pemilihan kepala daerah hanya diikuti dua kandidat, bahkan terdapat kasus melawan kotak kosong. Dampak koalisi tingkat nasional juga menyebabkan partai enggan mengusung kandidat baru. Fenomena politik kartel di Indonesia pasca-Reformasi mencerminkan pola di mana partai-partai politik besar berkolaborasi bukan hanya untuk memenangkan pemilu, tetapi juga untuk mempertahankan dominasi mereka dalam sistem politik. Dalam konteks Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Plus, strategi ini mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang semakin mengurangi kompetisi politik yang sehat.

Dampak dari politik kartel ini dapat mencakup (Andi Suwarko : Politik Kartel, Anies Baswedan, dan Pilkada Jakarta 2024: Operasi Politik yang Mengubah Arah Kontestasi)

1. Melemahnya Oposisi – Dengan semakin banyak partai bergabung dalam satu koalisi besar, peran oposisi dalam mengawasi pemerintahan menjadi lemah atau bahkan nyaris hilang. Ini bisa berakibat pada minimnya mekanisme check and balance yang efektif dalam pemerintahan.
2. Dominasi Politik dan Oligarki – Aliansi semacam ini sering kali membuat keputusan politik lebih ditentukan oleh elite partai daripada oleh aspirasi rakyat. Politik menjadi semakin elitis dan jauh dari prinsip demokrasi yang partisipatif.
3. Pengaruh Besar dalam Kebijakan Publik – Dengan kekuatan politik yang hampir tak tertandingi, koalisi besar ini bisa memengaruhi pembuatan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

4. Menurunnya Kompetisi dalam Pemilu– Jika semua partai besar berkoalisi, pemilu bisa menjadi sekadar formalitas tanpa persaingan nyata yang memungkinkan masyarakat memiliki pilihan alternatif yang beragam. Di satu sisi, koalisi besar dapat membawa stabilitas politik dan meminimalkan konflik politik yang berkepanjangan. Namun, di sisi lain, jika tidak ada oposisi yang kuat, demokrasi bisa mengalami stagnasi dan kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang menjamin representasi rakyat.

2. Partisipasi Pemilih Menurun

Penurunan partisipasi pemilih tercatat di berbagai wilayah, seperti yang dilaporkan oleh KPU Jakarta. Faktor seperti rendahnya militansi pendukung kandidat. Teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dapat memberikan penjelasan. Habermas menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan ruang publik untuk diskusi terbuka dan rasional. Militansi masyarakat kultural di Banten sangat menurun drastis, padahal sebelumnya pasukan berani mati nya Dinasti ATut adalah tidak dapat didebat. (Habermas: Public Sphere)

3. Kejutan di Banten dan Sulawesi Utara

Kekalahan Airin di Banten dan kemenangan Yulius di Sulawesi Utara melawan dua tokoh besar menjadi kejutan besar. Hasil exit poll dan quick count menunjukkan perbedaan signifikan dengan survei prapemilu. Faktor kecurangan, militansi pemilih, dan strategi kampanye menjadi variabel utama yang perlu dianalisis lebih lanjut. Setelah dihukumnya Atut Chosiyah terdapat penurunan drastis pendukung Keluarga Atut. Fenomena pencalonan Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur Banten menunjukkan bagaimana dinasti politik terus memainkan peran dominan dalam kontestasi politik di daerah. Dinasti politik di Banten, yang berakar kuat sejak era Ratu Atut Chosiyah, telah membangun jaringan loyalis dan relawan yang solid serta terstruktur, memungkinkan mereka untuk mempertahankan dominasi dalam berbagai arena politik dan organisasi strategis.

Beberapa faktor yang memperkuat keberlanjutan dinasti politik di Banten, antara lain:

1. Jaringan Loyalis yang Terawat – Basis pendukung yang loyal dan telah teruji dalam berbagai kontestasi politik memastikan bahwa setiap kandidat dari dinasti ini memiliki dukungan awal yang kuat.
2. Kendali atas Sumber Daya Politik dan Ekonomi – Dinasti politik sering kali memiliki akses terhadap sumber daya finansial, birokrasi, serta hubungan dengan organisasi bisnis dan masyarakat, yang memperkuat dominasi mereka.

3. Mobilisasi Relawan yang Efektif – Tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah, jaringan ini juga aktif dalam pemilihan legislatif dan organisasi seperti Kadin, Gapensi, dan KNPI, menunjukkan bahwa pengaruh politik mereka meluas ke berbagai sektor.

4. Minimnya Lawan yang Setara – Dengan dominasi politik yang begitu kuat, sulit bagi calon independen atau figur di luar jaringan dinasti untuk menandingi pengaruh mereka dalam pemilihan gubernur maupun jabatan politik lainnya.

Namun, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan besar terkait demokrasi dan regenerasi politik. Apakah dominasi dinasti politik ini memberikan manfaat bagi masyarakat Banten dalam bentuk kebijakan yang lebih baik dan pemerintahan yang bersih? Atau justru menciptakan politik oligarkis yang cenderung mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu?

4. Peran Endorsement Tokoh Nasional

Dukungan dari tokoh nasional, seperti Prabowo Subianto, memiliki dampak signifikan, terutama di Banten. Namun, dampaknya tidak selalu konsisten di wilayah lain, seperti Jakarta dan Jawa Tengah.

Meskipun Airin Rachmi Diany memiliki popularitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Andra Soni di awal kontestasi Pilgub Banten 2024, hasil akhir menunjukkan bahwa popularitas saja tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Perbandingan popularitas antara keduanya yang diibaratkan seperti buaya dan cicak mencerminkan jurang besar dalam pengenalan publik.

Namun, rendahnya elektabilitas awal Andra Soni yang hanya sekitar 12 persen dibandingkan dengan tokoh lain seperti Wahidin Halim, Dimiyati Natakusumah, dan Arief Wismansyah (15-20 persen) menunjukkan bahwa strategi politik, dukungan mesin partai, serta dinamika di lapangan lebih menentukan hasil akhir dibanding sekadar popularitas.

Kemenangan Andra Soni dalam Pilgub Banten bisa menjadi indikasi bahwa faktor lain seperti kekuatan jaringan politik, efektivitas kampanye, dan pergeseran preferensi pemilih berperan besar. Ini juga mencerminkan bahwa politik di Banten semakin kompetitif dan tak lagi didominasi oleh figur-figur yang hanya mengandalkan nama besar semata.

5. Keputusan MK tentang Ambang Batas Pencalonan Putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi momentum penting untuk memperluas partisipasi

politik. Sebelumnya, dominasi kotak kosong diprediksi meningkat karena minimnya kandidat yang memenuhi ambang batas.

KESIMPULAN

Pilkada serentak 2024 mencerminkan dinamika yang kompleks, termasuk menurunnya tingkat kompetisi dan munculnya hasil mengejutkan di beberapa daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi pemilih serta dominasi kartel politik, yang berpotensi menghambat kualitas demokrasi. Putusan MK terkait penghapusan ambang batas pencalonan diharapkan dapat memperluas peluang bagi lebih banyak kandidat untuk berkompetisi. Sebelum putusan tersebut, kemenangan kotak kosong semakin marak, dengan estimasi lebih dari 100 kepala daerah berpotensi menghadapi kotak kosong. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang seharusnya mengedepankan kompetisi antara sesama manusia, bukan melawan kotak kosong. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora.

Pada 2019, ketika Pak Prabowo berhadapan dengan petahana Presiden Jokowi, perolehan suaranya mengalami peningkatan di Banten. Dalam konteks Jawa Tengah, Pak Jokowi mampu mendorong kemenangan calon yang didukungnya, sementara di Jakarta hal tersebut tidak terjadi. Perbedaan ini disebabkan oleh strategi kampanye yang berbeda. Di Jawa Tengah, Pak Jokowi terjun langsung ke lapangan, mengunjungi berbagai daerah seperti Banyumas, Blora, Grobogan, Tegal, Solo, dan Semarang. Sebaliknya, di Jakarta, dukungan terhadap Ridwan Kamil hanya disampaikan dalam pertemuan dengan relawan, sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung. Selain itu, perbedaan ini juga dipengaruhi oleh karakteristik pemilih. Di Jakarta, sekitar 70% pemilih bersifat lebih independen dan cenderung menentukan pilihan berdasarkan keyakinan serta otonomi pribadi.

Di Jawa Tengah, pemilih yang bersifat otonom berada di bawah 50%, sementara di Banten angkanya kurang lebih sekitar 50%, terutama karena wilayah seperti Tangerang Selatan memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi. Namun, jika pemilih mengetahui suatu dukungan tetapi tidak mengikutinya, maka dampaknya tetap minim. Saya menduga bahwa jumlah pemilih yang mengetahui bahwa Pak Prabowo mendukung Pak Andra Soni tidak terlalu besar. Akan tetapi Anies Baswedan memainkan peran signifikan dalam mendukung Pramono Anung, dengan menerapkan strategi serupa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah. Namun, kali ini konteksnya adalah membantu Pramono, bukan sekadar

deklarasi dukungan. Anies mengerahkan tim kampanyenya secara penuh, bahkan turut serta dalam acara akbar dan mengenakan atribut tertentu, yang menunjukkan komitmen seriusnya. Dampak dari dukungan Anies ini cukup besar menjelang Pemilu, terutama terlihat dari meningkatnya dukungan pemilih Muslim terhadap Pramono. Hal ini disebabkan oleh basis pemilih Anies yang mayoritas berasal dari segmen Muslim. Namun, efeknya tidak sepenuhnya positif, karena ada penurunan dukungan dari pemilih non-Muslim. Sebelum deklarasi Anies, lebih dari 70% pemilih non-Muslim mendukung Pramono, tetapi setelahnya, angka ini mengalami penurunan.

Sebagian pemilih non-Muslim mulai mempertimbangkan alternatif lain, seperti Ridwan Kamil, terutama setelah melihat keterlibatan kelompok tertentu dalam kampanye Pramono. Sementara itu, Dharma Pongrekun dianggap sebagai pilihan moderat yang lebih dapat diterima oleh sebagian pemilih non-Muslim. Meskipun ada penurunan di segmen ini, secara keseluruhan, efek Anies tetap positif bagi Pramono karena jumlah pemilih Muslim yang masuk lebih besar daripada yang keluar.

Dukungan terhadap Pramono juga diperkuat oleh limpahan suara dari pemilih partai-partai Islam, termasuk mereka yang sebelumnya mendukung Anies dan PKS dalam Pilpres. Ada indikasi bahwa sebagian basis pemilih Anies memberikan "protes vote" terhadap keputusan PKS yang justru mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, setelah sebelumnya diisukan akan mendukung Anies.

Selain itu, faktor waktu juga berperan penting. Karena pencalonan kepala daerah dilakukan pada Agustus, sebelum Prabowo resmi dilantik dan membentuk kabinetnya, banyak partai lebih memilih menunggu peluang mendapatkan kursi di pemerintahan daripada mencalonkan kader sendiri. Akibatnya, pilihan bagi pemilih menjadi lebih terbatas. Tanpa putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan, PDIP mungkin tidak dapat mencalonkan kadernya sendiri. Lagi-lagi, keputusan politik lebih menguntungkan elite, sementara publik yang dirugikan karena keterbatasan alternatif calon.

Kesimpulan dan saran penelitian penulis adalah meliputi:

1. Peningkatan edukasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Faktor pemilih pemilu yang berpendidikan dan tidak berpendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- Pengetahuan Politik:

- o Pemilih yang berpendidikan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, kandidat, dan isu-isu yang relevan dalam pemilu.

- o Sebaliknya, pemilih yang tidak berpendidikan mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai proses politik, sehingga pengambilan keputusan mereka bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti janji politik atau pengaruh sosial.

- Keterlibatan dalam Proses Politik:

- o Pemilih yang berpendidikan lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti menghadiri debat, membaca berita politik, atau mengikuti kampanye.

- o Pemilih yang tidak berpendidikan mungkin kurang terlibat atau lebih pasif, yang dapat mengurangi kesadaran mereka tentang pentingnya memilih atau keputusan yang diambil pada pemilu.

- Sikap terhadap Pemilu:

- o Pemilih berpendidikan cenderung melihat pemilu sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan membuat perubahan.

- o Pemilih yang tidak berpendidikan mungkin melihat pemilu sebagai hal yang kurang relevan atau merasa tidak memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu.

- Pengaruh Ekonomi dan Sosial:

- o Pemilih yang berpendidikan sering kali memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dan lebih mandiri dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka terima.

- o Pemilih yang tidak berpendidikan mungkin lebih rentan terhadap pengaruh eksternal, seperti tekanan sosial atau janji politik yang tidak realistis, karena mereka lebih bergantung pada jaringan sosial atau faktor ekonomi dalam keputusan mereka.

- Persepsi terhadap Kandidat dan Partai:

- o Pemilih berpendidikan lebih cenderung untuk menganalisis visi dan misi kandidat atau partai secara kritis.

- o Pemilih yang tidak berpendidikan mungkin lebih mudah terpengaruh oleh retorika atau iklan politik yang tidak selalu berbasis pada fakta.

- Secara keseluruhan, pendidikan memengaruhi tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan pemahaman pemilih terhadap politik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi cara mereka memilih dalam pemilu.

2. Reformasi sistem pencalonan untuk mencegah dominasi kartel politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK. Tanpa keputusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan, PDIP mungkin tidak dapat mengajukan kadernya sebagai calon. Sekali lagi, keputusan politik tersebut lebih menguntungkan elite, sementara publik dirugikan karena terbatasnya pilihan calon.

3. Penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah kecurangan.

Jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Hukum Pemilu” merupakan semangat yang sangat terlihat untuk menghindari Politik Uang dan “deal-deal” transaksi politik. Bawaslu dalam konteks penegakan hukum Pemilu dapat melibatkan masyarakat, baik sebagai peserta dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu maupun sebagai pelapor dalam proses penegakan hukum Pemilu. BAWASLU bersama-sama masyarakat mendorong partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum Pemilu, sehingga keadilan Pemilu yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai.

4. Jadwal pelaksanaan Pilkada serentak hendaknya diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu dekat dengan Pilpres, guna menghindari pembatasan pilihan pemilih yang disebabkan oleh penantian calon Kepala Daerah untuk memperoleh posisi di pemerintahan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2010). Dinasti politik pasca-otonomi orde baru: Pengalaman Banten. *Prisma*, 29(3), 102-116.
- Agustino, L. (2014). Politik lokal & otonomi daerah. (No Title).
- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 16(1), 5-32.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. *The Review of Economic Studies*, 76(1), 115-142.
- Djafar, M. (2008). Demokratisasi, DPRD, dan Penguatan Politik Lokal. *Jurnal Poelitik*, 1(1).
- Djati, W. R. (2014). Revivalisme kekuatan familisme dalam Demokrasi: dinasti politik di aras lokal. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 18(2), 72-100.

- Eisenstadt, S. N., & Roniger, L. (1984). *Patrons, clients and friends: Interpersonal relations and the structure of trust in society*. Cambridge University Press.
- Hamid, A. (2015). *Observation of Democratic Decentralization in Indonesia during 2009–2014: Political Dynasty in Banten Province and Populism in Jakarta Province*. Doshisha University, Kyoto, Japan.
- Hamid, A. (2010). Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. *Politika, Jurnal Ilmu Politik*, 1(2).
- Haryanto, H. (2009). Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), 131-148.
- Irawan, A. (2016). *Dinasti Banten: keruntuhan dan kebangkitannya kembali*. Intrans Publishing.
- Ismanto, Gandung, 2013, dalam www.kompas.com, Sutisna, A. (2017). Gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100-120. diakses tanggal 14 Maret 2017.
- Majalah Gatra, No.52 Tahun XIX, 31 Oktober-6 November 2013.
- Majalah Hukum TIRO, Edisi 62/September 2011.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana.
- Masaaki, O., & Hamid, A. (2008). Jawara in Power, 1999—2007. *Indonesia*, (86), 109-138.
- van Klinken, G. A., & Nordholt, H. S. (2008). *Politik lokal di Indonesia*.
- Querubin, P. (2010). *Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines*. Unpublished manuscript, MIT.
- Sidel, J. T. (1999). *Capital, coercion, and crime: Bossism in the Philippines*. Stanford University Press.
- Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Thompson, M. R. (2012). Asia's hybrid dynasties. *Asian Affairs*, 43(2), 204-220.
- Zuhro, Siti, 2017, dalam www.beritasatu.com, diakses tanggal 12 Januari 2017.
- Y Nurmansyah. (2015). *Kekuasaan Dinasti Politik : Diakses pada hari kamis, 12 Oktober 2023, Pukul 15.12 WIB. PPID BAWASLU BABEL.*
<https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinastipolitik/>